



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SETIARTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN
3. NHK : 832025

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 11520 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 97.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MPV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. ----**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.647.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.647.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.